



## PROSES DAN TANTANGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN GEREJA PRESBITERIAN SINODAL

Subaedah Luma<sup>1</sup>  
Fakultas Teologi

Institut Agama Kristen Negeri Manado  
Manado, Indonesia  
[subaedahluma@iakn-manado.ac.id](mailto:subaedahluma@iakn-manado.ac.id)

Julinda Ahtri Andalangi<sup>3</sup>  
Fakultas Teologi

Institut Agama Kristen Negeri Manado  
Manado, Indonesia  
[julindaandalangi@gmail.com](mailto:julindaandalangi@gmail.com)

Frigita Ekasari Matheos<sup>2</sup>  
Fakultas Teologi

Institut Agama Kristen Negeri Manado  
Manado, Indonesia  
[frigitamatheos@gmail.com](mailto:frigitamatheos@gmail.com)

Jesica Panawar<sup>4</sup>  
Fakultas Teologi

Institut Agama Kristen Negeri Manado  
Manado, Indonesia  
[Jesicapanawar74@gmail.com](mailto:Jesicapanawar74@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the Presbyterian church governance system, focusing on its structure, advantages, and challenges encountered in decision-making processes. The Presbyterian governance system involves the election of elders from local churches who form a session, with the pastor holding equal authority as a member of the session. This session manages the local church's activities, while elders are also part of a presbytery and a general assembly with broader authority. The research employs a qualitative approach using literature analysis and case observations to understand the dynamics of church governance within a Presbyterian context. Findings indicate that the system supports wise leadership and church unity but faces challenges when decisions are influenced by financial power, leading to potential injustice and conflicts. The study's benefits include a deeper understanding of how this system operates in practice and recommendations for improving conflict management and decision-making. The conclusion emphasizes the need for transparency, leadership training, and the establishment of advisory boards to ensure that church decisions reflect the needs of the entire congregation, rather than the interests of financially influential individuals.*

**Keywords:** *Presbyterian System, Decision Making, Church Governance*

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pemerintahan gereja presbiterian, khususnya mengenai struktur, kelebihan, dan tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan. Sistem pemerintahan gereja presbiterian melibatkan pemilihan penatua dari gereja lokal yang membentuk sidang, dengan pendeta memiliki wewenang setara sebagai bagian dari sidang tersebut. Sidang ini berfungsi mengatur kegiatan gereja lokal, sedangkan penatua juga tergabung dalam presbiteri dan majelis umum yang memiliki wewenang lebih luas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur dan observasi kasus untuk memahami dinamika pemerintahan gereja dalam konteks presbiterian. Temuan menunjukkan bahwa sistem ini mendukung kepemimpinan bijaksana dan kesatuan gereja, namun mengalami tantangan ketika keputusan dipengaruhi oleh kekuasaan finansial, yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan konflik. Manfaat dari penelitian ini mencakup pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana sistem ini berfungsi dalam praktek serta rekomendasi untuk memperbaiki pengelolaan konflik dan pengambilan keputusan. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya transparansi, pelatihan kepemimpinan, dan pembentukan dewan penasihat untuk memastikan keputusan gereja mencerminkan kebutuhan seluruh jemaat, bukan hanya kepentingan individu dengan kekuatan finansial.*

**Kata Kunci:** *Sistem Presbiterian, Pengambilan Keputusan, Pemerintahan Gereja*

### ARTICLE HISTORY

Submitted: 04-07-2024 | Accepted: 11-08-2024 | Publication: 30-08-2024

© 2024 THEOSEBIA: Journal of Theology, Christian Religious Education and Psychospiritual  
This is an open-access article distributed under the CC BY-NC 4.0 license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## A. PENDAHULUAN

Gereja adalah tempat ibadah untuk umat Kristen, tetapi lebih dari itu, gereja juga merujuk pada semua orang yang percaya dan dipanggil oleh Tuhan untuk menyebarkan berita tentang keselamatan. Dengan kata lain, setiap orang yang percaya adalah bagian dari gereja. Mereka berkumpul dalam persekutuan, yang juga disebut gereja, untuk saling membantu dan memperkuat satu sama lain. Paulus menyebut gereja sebagai Tubuh Kristus, dengan Kristus sebagai kepalanya.<sup>1</sup> Pengambilan keputusan di gereja bisa sangat rumit dan penuh tantangan. Sebagai organisasi non-profit yang bertanggung jawab kepada jemaatnya dan masyarakat, gereja perlu membuat keputusan yang tepat untuk kegiatan dan pelayanan rohani. Namun, proses ini sering menghadapi masalah seperti konflik internal, kurangnya pemahaman terhadap sistem pemerintahan gereja, dan keterbatasan sumber daya manusia.

Masalah utama ini berasal dari kurangnya pemahaman dan pengelolaan yang baik dalam proses pengambilan keputusan. Gereja sering mengalami kesulitan dalam mengatur regulasi organisasi gereja, kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni, dan sistem manajemen yang kurang baik. Masalah ini bisa menyebabkan jemaat kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin dan pengurus gereja. Untuk menjaga agar gereja tetap teratur, tertib, dan aman, integritas dan pemahaman tentang pemerintahan gereja sangat penting. Sebagai organisasi, gereja membutuhkan pejabat atau sumber daya manusia yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengorganisir pertumbuhan, memastikan kestabilan dan kemajuan, serta menjaga keteraturan dan ketertiban di dalam gereja.<sup>2</sup>

Akibat dari masalah ini termasuk konflik internal, kurangnya kepercayaan dari jemaat, dan kesulitan dalam menjalankan kegiatan agama serta pelayanan rohani. Selain itu, kurangnya pemahaman pemerintahan gereja dan kekurangan sumber daya manusia yang efektif bisa menghambat pencapaian tujuan gereja. Gereja memiliki sistem pemerintahan yang menjadi struktur organisasi dan tata kelola untuk mengatur fungsinya. Sistem ini menentukan bagaimana keputusan diambil, siapa yang memiliki wewenang, dan bagaimana tanggung jawab dibagi antara pemimpin dan jemaat. Ada beberapa jenis sistem pemerintahan gereja, yaitu episkopal, presbiterial, dan kongregasional. Sistem ini mengatur aspek-aspek seperti moralitas dan ibadah, serta hubungan antar gereja dalam organisasi dan dengan denominasi lain.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Jonar T.H. Situmorang. *“Ekklesiologi: Gereja Yang Kelihatan Dan Tak Kelihatan: Dipanggil dan Dikuduskan Untuk Memberitakan Karya Penyelamatan Kristus”*. (Yogyakarta: ANDI, 2021), h. 8.

<sup>2</sup> Jairus Hasugian, S. Pantja Djati, dan Eddy Simanjuntak. “Pengaruh Pemahaman Rohaniwan Gereja tentang Model Pemerintahan Gereja terhadap Ketertiban Gereja”. *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*. Vol. 7. No. 1, Oktober 2022, h. 255.

<sup>3</sup> Derek J. Tidball. *“Teologi Pengembalaan: Suatu Pengantar”*. (Malang: Gandum Mas, 2020), h. 220.

Solusi untuk masalah ini adalah dengan menerapkan manajemen yang baik dalam pengambilan keputusan. Ini bisa dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan tentang pemerintahan gereja, mengembangkan sumber daya manusia yang efektif, dan sistem organisasi yang baik. Dengan cara ini, proses pengambilan keputusan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Serta penting untuk memiliki pemerintahan gereja yang efektif sesuai dengan sistem pemerintahan gereja agar struktur kepemimpinan dan administrasi berjalan dengan baik. Pemerintahan yang baik membantu menjaga kesejahteraan spiritual dan organisasi jemaat, memastikan gereja dapat menjalankan misinya dengan optimal dan tetap menjadi komunitas yang harmonis. Manfaat dari penerapan solusi ini termasuk meningkatnya kepercayaan jemaat terhadap pemimpin dan pengurus gereja, lebih efisiennya kegiatan agama dan pelayanan rohani, serta peningkatan pemahaman pemerintahan gereja dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan konsep penelitian ini diantaranya: Pertama. Penelitian oleh Clara Raflesiane Misahapsari dan Kalis Stevanus (2022) dengan topik “Manajemen dalam Pengambilan Keputusan di Gereja”. Penelitian ini membahas bagaimana manajemen digunakan dalam pengambilan keputusan di gereja. Pemimpin dan pengurus gereja diharapkan dapat mengatasi konflik dengan mengadakan rapat dan menyelesaikannya secara efektif, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih efisien dan efektif.<sup>4</sup> Kedua. Penelitian oleh Francesco Zaccaria (2023), dengan judul “*Synodality and Decision-Making Processes: Towards New Bodies of Participation in the Church*”. Penelitian ini fokus pada reformasi proses pengambilan keputusan di gereja melalui sinode (musyawarah gereja). Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi semua anggota gereja dan memberikan dasar argumen alkitabiah dan teologis untuk perubahan. Beberapa badan sinode baru di Amazon dan Jerman memberikan contoh cara memperbaiki struktur pengambilan keputusan dan membentuk badan musyawarah baru.<sup>5</sup> Ketiga. Penelitian oleh Rogério Anele dan tim dengan judul “*DECISION MAKING PROCESS IN A RELIGIOUS EDUCATIONAL INSTITUTION: A Study in the Marista Province of the Rio Grande do Sul*”. Penelitian ini mengkaji proses pengambilan keputusan di lembaga pendidikan religius di Brasil, khususnya di Rede Marista. Penulis melakukan wawancara dengan manajer senior untuk memahami bagaimana keputusan diambil dan menekankan pentingnya pembelajaran bersama. Hal ini bertujuan agar model mental

---

<sup>4</sup> Clara Raflesiane Misahapsari dan Kalis Stevanus. “Manajemen dalam Pengambilan Keputusan di Gereja”. *Jurnal Teologi Berita Hidup*. Vol. 5. No. 1, 2022, hh. 162-180.

<sup>5</sup> Francesco Zaccaria. “Synodality and Decision-Making Processes: Towards New Bodies of Participation in the Church”. *Religions*. Vol. 15. No. 1, 2023, h. 54.

dan keputusan yang diambil bisa diperbaiki melalui dialog dan kolaborasi, sehingga keputusan tidak hanya cepat, tapi juga efektif dan berkelanjutan.<sup>6</sup>

Penelitian ini mengidentifikasi kekurangan dalam studi mengenai proses pengambilan keputusan di pemerintahan gereja, khususnya terkait manajemen dan regulasi sistem pemerintahan gereja. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekurangan tersebut dengan memberikan analisis mendalam tentang bagaimana keputusan dibuat di pemerintahan gereja. Saat ini, hasil observasi menunjukkan bahwa di beberapa gereja, pengambilan keputusan tidak hanya bergantung pada para pemimpin gereja tetapi juga melibatkan suara jemaat yang memiliki pengaruh besar dalam pembangunan gereja. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mempelajari proses pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan gereja Presbiterial Sinodal, prinsip dasar pengambilan keputusan gereja, tantangan yang dihadapi, dan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pengambilan keputusan di gereja, mengidentifikasi tantangan yang ada, dan memberikan solusi efektif untuk meningkatkan pengetahuan pemerintahan gereja dan efisiensi dalam penerapan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan gereja kepada jemaatnya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan data secara rasional, empiris, dan sistematis, dengan tujuan penemuan, pembuktian, atau pengembangan pengetahuan. Data yang diperoleh harus valid, reliabel, dan obyektif. Penelitian bertujuan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode ini melibatkan pengumpulan data di lingkungan alami untuk memahami dan menafsirkan fenomena yang terjadi.<sup>8</sup> Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Ajay Rukajat yang dikutip dari Nasir (2002), metode deskriptif bertujuan untuk meneliti dan menggambarkan status suatu kelompok, objek, kondisi, atau peristiwa pada saat ini. Tujuannya adalah untuk memberikan deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antar fenomena yang diteliti.<sup>9</sup>

Pendekatan deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana seharusnya proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan gereja dilakukan, serta cara mengatasi berbagai

---

<sup>6</sup> Rogério Anele, Patrícia Martins Fagundes Cabral, and Luciane Wolff (2015). "DECISION MAKING PROCESS IN A RELIGIOUS EDUCATIONAL INSTITUTION: A Study in the Marista Province of the Rio Grande do Sul". *Business and Management Review*. Vol. 4. No. 5, hh. 543-551.

<sup>7</sup> Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". (Bandung: CV. ALFABETA, 2013), hh. 2-3.

<sup>8</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan. "Metodologi Penelitian Kualitatif". (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 8.

<sup>9</sup> Ajat Rukajat. "Pendekatan Penelitian Kuantitatif". (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018), h. 1.

tantangan yang mungkin timbul. Penelitian ini dilakukan di sebuah gereja di Sulawesi Utara dengan fokus pada sistem pemerintahan gereja presbiterial-sinodal. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, yang melibatkan analisis literatur dan observasi kasus. Peneliti melakukan observasi langsung dan menelaah berbagai artikel ilmiah serta buku yang relevan dengan topik penelitian, dari berbagai sumber nasional dan internasional. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas pernyataan tesis yang telah dipaparkan di bagian pendahuluan makalah.

## **C. TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tugas dan Tanggung Jawab dalam Sistem Pemerintahan Gereja**

Bahasa Inggris “gereja” disebut “*church*,” dan ada beberapa istilah serupa dalam bahasa lain, seperti “*kirk*” dalam bahasa Skotlandia, “*kerk*” dalam bahasa Belanda, dan “*eglise*” dalam bahasa Prancis. Kata “*church*” berasal dari bahasa Yunani “*kuriakon*” atau “*kuriakos*,” yang berarti “milik Tuhan,” karena berasal dari kata “*kurios*” yang berarti Tuhan. Situmorang menjelaskan, Martin Luther mencatat bahwa istilah ini awalnya digunakan untuk menyebut bangunan gereja dan kemudian diadopsi dalam bahasa Jerman melalui bahasa Gotik. Dengan demikian, istilah “*kirche*” tidak berasal dari istilah Yunani “*kyria*” atau “*ekklisia*” (yang berarti kumpulan) atau dari istilah Latin “*curia*” (yang merujuk pada pertemuan para bangsawan di Romawi kuno).<sup>10</sup> Jadi, gereja bukan hanya sebuah bangunan, tetapi juga komunitas orang-orang yang berkumpul untuk beribadah, belajar, dan melayani. Gereja dapat menjadi tempat yang menginspirasi dan memberikan manfaat bagi kehidupan jemaat dan masyarakat sekitar. Seiring waktu, gereja memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat.

Gereja memiliki tiga tanggung jawab utama: Koinonia (persekutuan), Marturia (kesaksian), dan Diakonia (pelayanan). Koinonia berasal dari kata Yunani “*koinon*” yang berarti bersekutu. Dalam Yunani kuno, koinonia menggambarkan hubungan dekat antara manusia dan dewa-dewa. Namun, dalam konteks Perjanjian Baru, koinonia berarti persekutuan jemaat dalam Kristus, di mana semua anggota membentuk satu tubuh meskipun banyak jumlahnya. Sedangkan Marturia berarti kesaksian, dan “*marturein*” berarti bersaksi. Walaupun jemaat masa kini tidak menyaksikan langsung karya Yesus Kristus, mereka tetap memberikan kesaksian tentang iman mereka kepada-Nya. Kesaksian ini mencerminkan keyakinan mereka akan pemeliharaan Allah dalam hidup mereka. Serta Diakonia berarti pelayanan, dan “*diakonein*” berarti melayani. Dalam Perjanjian Baru, “*diakonein*”

---

<sup>10</sup> Jonar T.H. Situmorang. “*Ekklesiologi: Gereja Yang Kelihatan Dan Tak Kelihatan: Dipanggil dan Dikuduskan Untuk Memberitakan Karya Penyelamatan Kristus*”, hh. 1-2.

berhubungan dengan cara Yesus melayani orang lain, mengikuti perintah kasih dalam Perjanjian Lama. Secara harfiah, diakonia berarti melayani di meja, seperti yang dilakukan oleh Yesus dengan melayani murid-murid-Nya. Ini termasuk membantu, menyediakan kebutuhan, dan mengabdikan kepada orang lain.<sup>11</sup> Untuk menjalankan tugas-tugas penting ini, gereja memerlukan pemimpin yang dapat mengatur dan memimpin berbagai aspek pelayanan gereja. Dengan demikian, keberadaan pejabat gereja sangat penting untuk mendukung fungsi dan tanggung jawab gereja.

Menurut Sunarto, John Calvin dalam bukunya "Institutio" menjelaskan dasar-dasar teori untuk sistem pemerintahan gereja. Calvin membagi kekuasaan gereja menjadi dua bagian utama: satu berada pada penilik jemaat atau pemimpin lokal di setiap jemaat, dan yang lainnya pada sinode-sinode, yaitu pertemuan gereja di tingkat wilayah (sinode wilayah) maupun yang lebih luas (sinode umum). Calvin juga menjelaskan lebih rinci tentang struktur pemerintahan gereja dalam bukunya "Ordonnances Ecclesiastiques" (Peraturan-Peraturan Gereja).<sup>12</sup> Menurut Calvin dalam Aritonang, ada empat jabatan utama dalam gereja: a). Gembala atau Pendeta (Pastor): Bertugas menggembalakan jemaat dan memberitakan firman Tuhan serta melayankan sakramen. b). Pengajar (Doctor): Bertanggung jawab atas pendidikan teologis. Pengajar tersebut termasuk guru agama dan dosen teologi. c) Penatua (Presbyter): Mengawasi pemerintahan gereja, menyuarakan suara jemaat, dan menangani disiplin moral. d). Syamas atau Diaken (Diacon): Melayani kebutuhan praktis dan sosial jemaat, seperti mengurus orang sakit dan miskin, serta mengatur keuangan jemaat. Dengan demikian, Calvin menciptakan sebuah kerangka teoritis yang jelas untuk pemerintahan gereja, dengan peran dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik untuk setiap jabatan.<sup>13</sup>

Jabatan-jabatan ini memiliki tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik untuk memastikan kehidupan gereja berjalan sesuai dengan ajaran dan peraturan gereja. Pendeta bekerja bersama penatua untuk memantau kehidupan spiritual jemaat dan memberikan bimbingan jika ada yang menyimpang. Pengajar bertugas mengajarkan iman Kristiani, sementara penatua menjaga kedisiplinan dan ketertiban. Diaken fokus pada pelayanan sosial dan kemanusiaan, termasuk mengatur bantuan untuk yang membutuhkan dan bekerja sama dengan lembaga sosial. Untuk menjalankan tugas-tugas ini dengan efektif, gereja memerlukan sistem pemerintahan yang baik untuk mengatur struktur kepemimpinan dan proses pengambilan keputusan.

---

<sup>11</sup> Harianto GP. "Teologi Pastoral". (Yogyakarta: PBMR ANDI, 2020), h. 48-51.

<sup>12</sup> Sunarto. "Perbandingan Antara Bentuk Presbiterian Dan Kongregasional Dalam Pemerintahan Jemaat". *TE DEUM: Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan*. Vol. 3. No. 1, 2013, h. 47.

<sup>13</sup> Jan S. Aritonang. "BERBAGAI ALIRAN di Dalam dan di Sekitar Gereja". (Jakarta: Gunung Mulia, 1995), h. 68.

Penerapan sistem pemerintahan gereja Presbiterial Sinodal dapat membawa banyak manfaat praktis untuk meningkatkan kualitas pelayanan gereja kepada jemaatnya. Dalam sistem ini, gereja dipimpin oleh penatua yang bekerja sama dengan sinode untuk mengatur berbagai aspek kehidupan gereja. Implikasi praktis pertama dari sistem ini adalah penguatan struktur kepemimpinan. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas antara pendeta, pengajar, penatua, dan diaken, setiap individu dalam gereja memiliki peran yang terdefinisi dengan baik. Pendeta fokus pada pemberitaan firman dan pelayanan sakramen, pengajar menangani pendidikan teologis, penatua mengawasi disiplin dan kebijakan gereja, sementara diaken berfokus pada pelayanan sosial. Struktur ini mempermudah koordinasi dan memastikan bahwa setiap aspek pelayanan gereja dapat dijalankan secara efektif dan efisien.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, gereja harus memastikan bahwa setiap jabatan dijalankan oleh individu yang kompeten dan berdedikasi, dan bahwa mereka bekerja sama dalam suasana yang harmonis. Solusi praktis kedua adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Dalam sistem pemerintahan Presbiterial Sinodal, keputusan penting diambil melalui sinode dan rapat-rapat gerejawi yang melibatkan perwakilan dari berbagai tingkat kepemimpinan. Proses ini memungkinkan adanya masukan dari berbagai pihak dan meminimalkan keputusan yang diambil secara sepihak. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, gereja harus menerapkan sistem yang memastikan bahwa keputusan diambil secara terbuka, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan dipertanggungjawabkan kepada jemaat. Dengan cara ini, jemaat akan merasa lebih terlibat dan percaya bahwa keputusan yang diambil mendukung kepentingan mereka. Penerapan sistem pelaporan dan feedback yang teratur juga dapat membantu menjaga transparansi dan memperbaiki proses pengambilan keputusan.

Terakhir perlu adanya pengembangan dan pelatihan berkelanjutan bagi pemimpin gereja. Dalam sistem Presbiterial Sinodal, pemimpin gereja seperti penatua dan diaken memegang tanggung jawab besar dalam mengawasi dan melayani jemaat. Untuk memastikan mereka dapat menjalankan tugas dengan baik, gereja perlu menyediakan pelatihan reguler dan dukungan profesional. Pelatihan ini harus mencakup aspek-aspek seperti manajemen gereja, pelayanan pastoral, dan keterampilan interpersonal. Dengan meningkatkan kompetensi pemimpin gereja, kualitas pelayanan yang diberikan kepada jemaat juga akan meningkat. Gereja harus menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk memastikan bahwa semua pemimpin memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab mereka dengan efektif. Dengan melakukan hal ini, gereja akan dapat menghadapi tantangan yang muncul dan melayani jemaat dengan lebih baik, menciptakan komunitas yang lebih kuat dan lebih bersatu.

## 2. Sistem Pemerintahan Presbiterial Sinodal

Kata “jabatan” dalam bahasa Yunani, memiliki beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan “jabatan”, di antaranya: *Arche* merujuk pada kekuasaan atau pemerintahan, *Time* berarti pangkat atau kehormatan, dan *Leitourgia* berarti pelayanan atau pekerjaan untuk masyarakat. Namun, istilah yang paling sering dipakai dalam konteks gereja adalah diakonia, yang berarti pelayanan. Jabatan dalam gereja berbeda dari jabatan di pemerintahan negara; di gereja, jabatan lebih berfokus pada melayani jemaat, bukan pada pangkat atau kekuasaan.<sup>14</sup> Di gereja yang menerapkan sistem pemerintahan presbiterial sinodal, masa jabatan anggota majelis dibatasi untuk memastikan pergantian kepemimpinan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi regenerasi dan pembaruan dalam pengelolaan gereja. Dalam sistem ini, presbiterial berarti gereja setempat memiliki otonomi dan dipimpin oleh Majelis Jemaat, sementara sinodal menunjukkan bahwa gereja-gereja dalam sinode harus mengikuti keputusan sinode untuk masalah-masalah umum yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh gereja setempat.<sup>15</sup>

Sistem pemerintahan gereja presbiterian, setiap gereja lokal memilih penatua untuk membentuk sebuah sidang. Pendeta gereja juga termasuk dalam sidang ini, dan semua penatua, termasuk pendeta, memiliki wewenang yang setara. Sidang ini bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan dan keputusan di gereja lokal. Namun, penatua di gereja lokal juga merupakan bagian dari sebuah presbiteri, yang mengawasi beberapa gereja di wilayah tertentu. Presbiteri terdiri dari penatua-penatua dari berbagai gereja dan memiliki wewenang yang lebih luas. Selain itu, ada juga “majelis umum” yang terdiri dari anggota presbiteri dan memiliki kekuasaan atas semua gereja presbiterian di negara atau wilayah tersebut. Sistem ini sering didukung dengan tiga argumen utama. Pertama, orang-orang yang memiliki kebijaksanaan dan karunia sebagai penatua sebaiknya memimpin lebih dari satu gereja lokal untuk memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman mereka secara lebih luas. Kedua, sistem ini memperkuat kesatuan tubuh Kristus di tingkat nasional atau global dengan memastikan adanya koordinasi dan konsistensi ajaran dan praktik gereja. Ketiga, sistem presbiterian lebih efektif dalam mencegah kesalahan doktrin karena strukturnya memungkinkan pengawasan dan koreksi yang lebih baik dibandingkan dengan jaringan gereja-gereja sukarela. Namun, dalam praktiknya, kekuasaan dalam sistem ini seringkali terlalu jauh dari kendali jemaat biasa. Meskipun kekuasaan utama seharusnya ada di tangan pimpinan gereja lokal, struktur ini membuat keputusan yang diambil oleh majelis yang lebih besar seperti presbiteri atau majelis umum terasa jauh dari kebutuhan dan keinginan jemaat. Ini mengakibatkan bahwa kaum

---

<sup>14</sup> Tesalonika Piri, Agnes Poluan, dan Johanna Zetlight. “Jabatan Gerejawi Dalam Sistem Presbiterial Sinodal di GMIM”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol. 8. No. 20, Oktober 2022, h. 16.

<sup>15</sup> Suharto Prodjowijono. “*Manajemen Gereja: Sebuah Alternatif*”. (Jakarta: Gunung Mulia, 2008), h. 10.

awam, yang tidak memiliki hak suara di tingkat sidang atau presbiteri, sering merasa terpinggirkan. Sistem ini membuat perubahan menjadi sulit karena kurangnya keterlibatan jemaat dalam proses pengambilan keputusan.<sup>16</sup>

Sistem pemerintahan gereja yang digunakan oleh beberapa gereja suku di Sulawesi Utara adalah presbiterial sinodal. Sistem ini didasarkan pada keyakinan bahwa Kristus adalah pemimpin utama gereja, sebagai kepala dan Tuhan jemaat-Nya. Pemerintahan gereja dilakukan melalui ajaran dan bimbingan Firman Tuhan serta Roh Kudus. Kristus memimpin melalui pejabat gereja yang bertugas sebagai alat dan hamba-Nya. Presbiterial berarti gereja setempat memiliki kebebasan dan diatur oleh Majelis Jemaat. Sinodal menunjukkan bahwa gereja-gereja dalam sinode harus mengikuti keputusan yang diambil dalam pertemuan sinode untuk masalah-masalah umum yang tidak bisa diatasi sendiri oleh gereja setempat. Sinode adalah pertemuan yang melibatkan wakil dari berbagai gereja, bukan badan gereja itu sendiri. Dengan struktur ini, gereja-gereja terikat oleh komitmen bersama dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan di tingkat klasis, sinode wilayah, dan Sinode.<sup>17</sup> Dalam sistem pemerintahan presbiterial-sinodal, keputusan yang berkaitan dengan kehidupan jemaat dibuat oleh majelis yang disebut presbyterium. Presbyterium ini terdiri dari penatua dan pendeta yang bertanggung jawab untuk mengelola dan membimbing jemaat setempat. Mereka memutuskan hal-hal sehari-hari seperti program ibadah, kegiatan pelayanan, dan administrasi gereja, memastikan setiap jemaat dapat mengatur urusannya sendiri sesuai kebutuhan lokal.

Permasalahan yang menjadi polemik dan mempengaruhi seluruh gereja, baik di tingkat wilayah maupun sinode. Untuk isu-isu ini, keputusan tidak dapat diambil hanya oleh presbyterium jemaat lokal. Sebaliknya, keputusan tersebut dibahas dan diputuskan dalam sinode, sebuah pertemuan yang melibatkan wakil dari setiap presbyterium. Sinode berfungsi sebagai forum untuk diskusi dan pengambilan keputusan bersama yang mengakomodasi berbagai pandangan dan kepentingan jemaat. Sistem ini menyeimbangkan kemandirian jemaat lokal dengan kesatuan gereja secara keseluruhan, memungkinkan keputusan yang lebih inklusif dan representatif. Namun, dalam praktiknya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sering kali orang-orang yang memberikan sumbangan besar di gereja bisa lebih didengar daripada penatua dalam proses pengambilan keputusan. Situasi ini dapat menciptakan ketidakadilan dan mengabaikan prinsip dasar sistem presbiterial-sinodal yang seharusnya menekankan pada keputusan yang diambil oleh penatua sebagai perwakilan resmi jemaat, sesuai ajaran Kristus dan bimbingan Roh Kudus.

---

<sup>16</sup> Wayne Grudem. *Systematic theology: An introduction to Bible doctrine*. (Grand Rapids: Zondervan, 1994), hh. 1533-1535.

<sup>17</sup> Rijnardus A. Van Kooij. *Menguak Fakta, Menata Karya Nyata*. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), hh. 44-45.

Intervensi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan di gereja dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif yang signifikan terhadap pengelolaan dan dinamika internal gereja. Salah satu dampak utama adalah terjadinya ketidakadilan dalam proses pengambilan keputusan. Ketika pemangku kepentingan, seperti donatur besar atau anggota berpengaruh, memiliki kekuatan lebih dalam mempengaruhi keputusan gereja, ini dapat mengabaikan suara anggota jemaat lainnya. Misalnya, keputusan tentang alokasi anggaran, program pelayanan, atau arah strategis gereja mungkin lebih dipengaruhi oleh kontribusi finansial daripada kebutuhan spiritual dan sosial jemaat secara keseluruhan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam prioritas pelayanan dan mengabaikan kebutuhan anggota gereja yang kurang beruntung. Akibatnya, dapat muncul ketidakpuasan dan perpecahan di kalangan jemaat yang merasa tidak diperlakukan secara adil atau terabaikan.

Selain itu, intervensi yang tidak seimbang dari pemangku kepentingan dapat merusak prinsip dasar sistem pemerintahan gereja yang seharusnya bersifat kolektif dan partisipatif. Dalam sistem presbiterial-sinodal, keputusan diharapkan diambil melalui diskusi dan konsensus di antara para penatua dan pendeta yang mewakili jemaat. Namun, ketika individu dengan kekuasaan atau pengaruh besar mengendalikan keputusan, proses ini menjadi tidak transparan dan kurang demokratis. Ini tidak hanya mengurangi kepercayaan anggota jemaat terhadap kepemimpinan gereja, tetapi juga mengurangi efektivitas keputusan yang diambil karena tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi kolektif jemaat. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan gereja dan menurunkan semangat komunitas.

Untuk mengatasi masalah ini, gereja perlu menerapkan beberapa solusi praktis yang dapat membantu menjaga keadilan dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Pertama, gereja harus memperkuat mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses keputusan. Ini bisa dilakukan dengan mengadakan pertemuan terbuka di mana semua anggota jemaat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan memberikan masukan. Selain itu, dokumen dan hasil keputusan penting harus tersedia untuk semua anggota agar mereka dapat memantau dan memahami proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, gereja perlu menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang adil dan seimbang dengan memastikan bahwa semua keputusan diambil berdasarkan prinsip-prinsip spiritual dan kebutuhan komunitas, bukan berdasarkan pengaruh pribadi atau kontribusi finansial. Ini bisa melibatkan peninjauan kembali dan penegakan kebijakan yang membatasi pengaruh individu tertentu dalam pengambilan keputusan, serta mengedepankan konsultasi dan konsensus di antara berbagai pihak terkait.

Pendidikan dan pelatihan bagi pemimpin gereja dan anggota jemaat juga penting untuk memastikan bahwa mereka memahami dan menghargai prinsip-prinsip pemerintahan gereja yang

adil dan partisipatif. Dengan melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan, gereja tidak hanya menjaga keadilan dan transparansi tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan dukungan di antara anggota jemaat. Dengan langkah-langkah ini, gereja dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis, serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Kristiani.

### **3. Tantangan Dalam Pengambilan Keputusan di Gereja**

Gereja sering menghadapi berbagai konflik, baik dari internal maupun eksternal. Konflik internal bisa timbul dari manajemen dan administrasi yang tidak jelas, kurangnya transparansi keuangan, atau kebijakan yang dianggap hanya menguntungkan pihak tertentu. Sedangkan konflik eksternal dapat berupa penolakan dari masyarakat sekitar atau pengaruh politik. Konflik-konflik ini bisa membuat suasana ibadah menjadi tidak nyaman, menimbulkan pertentangan antar anggota jemaat, mengurangi kehadiran dalam ibadah, dan mengganggu pelayanan gereja.<sup>18</sup> Dalam organisasi mana pun, termasuk gereja, konflik sering muncul sebagai tantangan meski seorang pemimpin sudah melaksanakan tugas sesuai visi. Isakh Hendrik dalam Misahapsari menjelaskan bahwa meskipun gereja adalah organisasi spiritual yang mengajarkan cinta kasih dan perdamaian, gereja tidak kebal dari konflik. Konflik dalam gereja bisa terjadi karena berbagai masalah seperti program kerja, ketegangan antarpribadi, perbedaan kelompok, atau konflik antara pimpinan gereja dan anggota jemaat. Oleh karena itu, penting bagi gereja untuk mengelola konflik dengan bijaksana dan sesuai dengan prinsip Kristiani.<sup>19</sup>

Observasi menunjukkan bahwa keputusan yang seharusnya diambil oleh pemimpin gereja sering kali dipengaruhi oleh anggota jemaat yang memiliki kekuasaan finansial. Situasi ini bisa menimbulkan banyak konflik dan tantangan dalam pengambilan keputusan. Ketidakadilan bisa terjadi ketika suara jemaat lain terabaikan dan dominasi oleh jemaat kaya bisa melemahkan otoritas pemimpin gereja. Selain itu, terbentuknya kelompok-kelompok kekuasaan di gereja dapat menyebabkan perpecahan. Untuk mengatasi masalah ini, gereja perlu memastikan bahwa proses pengambilan keputusan tetap inklusif, mencerminkan nilai-nilai spiritual, dan menjaga transparansi serta komunikasi yang terbuka di antara semua anggota jemaat.

Manajemen konflik di gereja sangat penting karena dapat mencegah perpecahan di antara jemaat. Jika konflik tidak ditangani dengan baik, dapat menyebabkan perpecahan dalam gereja dan merusak citra gereja di mata masyarakat. Menyelesaikan konflik dengan bijaksana membantu gereja

---

<sup>18</sup> Edwin Tjandraputra, Dyoys Rantung, et al. "Manajemen Pendidikan Agama Kristen dalam Konflik di Gereja dan Keluarga". *REGULA FIDEI: Jurnal Pendidikan Agama Kristen*. Vol. 8, No. 2, September 2023, h. 94.

<sup>19</sup> Clara Raflesiane Misahapsari dan Kalis Stevanus. "Manajemen dalam Pengambilan Keputusan di Gereja". *Jurnal teologi Berita Hidup*. Vol. 5, No. 1, September 2022, h. 169.

menjaga kesatuan dan integritas sebagai komunitas Kristen. Selain itu, manajemen konflik yang efektif dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan gereja. Dengan menangani konflik dengan baik, gereja bisa belajar dari pengalaman tersebut, memperbaiki sistem dan proses yang mungkin menyebabkan konflik, dan menjadi lebih matang serta kuat dalam menghadapi tantangan di masa depan.<sup>20</sup>

Untuk mengatasi masalah yang muncul ketika keputusan di gereja dipengaruhi oleh anggota dengan kekuasaan finansial, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan sangat penting. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan semua jemaat dalam diskusi dan evaluasi keputusan serta mempublikasikan laporan keuangan dan keputusan penting secara terbuka. Kedua, pemberdayaan dan pelatihan bagi pemimpin gereja perlu dilakukan. Pelatihan ini bisa mencakup keterampilan kepemimpinan, manajemen konflik, dan komunikasi yang efektif untuk membantu pemimpin mengelola kekuasaan dan dinamika internal. Ketiga, membentuk dewan penasihat dengan anggota dari berbagai latar belakang bisa memberikan perspektif yang lebih luas dan menyeimbangkan kekuasaan. Dewan ini dapat memberikan masukan berharga dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, mengembangkan mekanisme mediasi dan resolusi konflik yang berlandaskan nilai-nilai Kristen dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil. Dengan langkah-langkah ini, gereja dapat memastikan bahwa keputusan dibuat berdasarkan visi spiritual dan kebutuhan komunitas secara keseluruhan, bukan hanya oleh individu dengan kekuatan finansial. Ini akan mengurangi konflik dan memperkuat otoritas pemimpin gereja.

#### **D. KESIMPULAN**

Sistem pemerintahan gereja presbiterian melibatkan struktur di mana setiap gereja lokal memilih penatua untuk membentuk sidang, dengan pendeta yang juga berperan sebagai penatua dalam sidang tersebut. Sidang ini mengatur kegiatan gereja lokal, sementara penatua juga tergabung dalam presbiteri yang mengawasi beberapa gereja di wilayah tertentu, dan majelis umum yang memiliki wewenang di tingkat sinode. Sistem ini mendukung keterlibatan pemimpin yang bijaksana dalam memimpin lebih dari satu gereja, memperkuat kesatuan tubuh Kristus secara nasional atau global, dan mencegah kesalahan doktrin. Namun, tantangan muncul ketika keputusan dipengaruhi oleh anggota dengan kekuasaan finansial, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan konflik. Untuk mengatasi masalah ini, gereja perlu meningkatkan transparansi, melatih kepemimpinan, dan membentuk dewan penasihat untuk memastikan keputusan didasarkan pada kebutuhan seluruh jemaat, bukan hanya kekuatan finansial beberapa individu.

---

<sup>20</sup> Syeny Igir dan Nathanail Sitepu. "Manajemen Konflik Bagi Gereja Masa Kini Menurut Kisah Para Rasul 6: 1-7". *HARVESTER: Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen*. Vol. 8. No. 2, Desember 2023, hh. 120-121.

## E. REFERENSI

- Anele, R., Cabral, P. M. F., & Wolff, L. (2015). "DECISION MAKING PROCESS IN A RELIGIOUS EDUCATIONAL INSTITUTION: A Study in the Marista Province of the Rio Grande do Sul". *Business and Management Review*. Vol. 4. No. 5, hh. 543-551.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*. Sukabumi: CV Jejak.
- Aritonang, J. S. (1995). *"BERBAGAI ALIRAN di Dalam dan di Sekitar Gereja"*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- G. P. Harianto. (2020). *"Teologi Pastoral"*. Yogyakarta: PBMR ANDI.
- Grudem, W. (1994). *"Systematic theology: An introduction to Bible doctrine"*. Grand Rapids: Zondervan.
- Hasugian, J., Djati, S. P., & Simanjuntak, E. (2022). "Pengaruh Pemahaman Rohaniwan Gereja tentang Model Pemerintahan Gereja terhadap Ketertiban Gereja". *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*. Vol. 7. No. 1, hh. 254-267.
- Igir, S. Y., & Sitepu, N. (2023). "Manajemen Konflik Bagi Gereja Masa Kini Menurut Kisah Para Rasul 6: 1-7". *HARVESTER: Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen*. Vol. 8. No. 2, hh. 117-133.
- Misahapsari, C. R., & Stevanus, K. (2022). "Manajemen dalam Pengambilan Keputusan di Gereja". *Jurnal teologi Berita Hidup*. Vol. 5. No. 1, hh. 162-180.
- Piri, T. B., Poluan, A. R., & Zetlight, J. P. (2022). "Jabatan Gerejawi Dalam Sistem Presbiterial Sinodal di GMIM". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol. 8. No. 20, hh. 15-20.
- Prodjowijono, S. (2008). *"Manajemen gereja: sebuah alternatif"*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Rukajat, Ajat (2018). *"Pendekatan Penelitian Kuantitatif"*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Situmorang, Jonar T. H. (2021). *"Ekklesiologi: Gereja Yang Kelihatan Dan Tak Kelihatan: Dipanggil dan Dikuduskan Untuk Memberitakan Karya Penyelamatan Kristus"*. Yogyakarta: ANDI.
- Sugiyono (2013). *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"*. Bandung: CV. ALFABETA.
- Sunarto (2013). "Perbandingan Antara Bentuk Presbiterian Dan Kongregasional Dalam Pemerintahan Jemaat". *TE DEUM: Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan*. Vol. 3. No. 1, hh. 43-62.
- Tidball, Derek J. (2020). *"Teologi Penggembalaan: Suatu Pengantar"*. Malang: Gandum Mas.

- Tjandraputra, E. Rantung D., et al. (2023). "Manajemen Pendidikan Agama Kristen dalam Konflik di Gereja dan Keluarga". *REGULA FIDEI: Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, Vol. 8. No. 2, hh. 93-107.
- Van Kooij, R. A. (2008). "*Menguak Fakta Menata Karya Nyata*". Jakarta: GunungMulia.
- Zaccaria, F. (2023). "Synodality and Decision-Making Processes: Towards New Bodies of Participation in the Church". *Religions* Vol. 15. No. 1, h. 54.